

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan adanya *Coronavirus Disease 2019* atau yang biasa disingkat COVID-19. Wabah ini pertama kali muncul di Wuhan, China, dan terus menyebar ke kawasan Asia Tenggara dan negara di dunia. Mewabahnya COVID-19 telah menyebabkan perubahan besar pada perekonomian dunia dan berdampak parah pada berbagai sektor masyarakat, seperti penerbangan, manufaktur, pariwisata, dan pendidikan (Fu dan Shen, 2020; Nicola et al., 2020). Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan terdapat 309 juta pengangguran pada kuartal kedua tahun 2020 akibat COVID-19, dan banyak perusahaan juga terkena dampak kebijakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti *lockdown* (Ceylan dkk., 2020). PDB global turun sebesar 5,2% pada tahun 2020 (YoY) (Bank Dunia, 2021). Virus ini menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak dapat diprediksi, virus ini telah menjadi katalis bagi krisis ekonomi global.

Menyusul adanya pandemi global COVID-19, sejumlah negara menerapkan kebijakan termasuk membatasi mobilitas penduduk dan lalu lintas masuk dan keluar dari suatu negara. Tindakan-tindakan tersebut semakin berdampak pada perdagangan internasional dan menjadikan situasi perekonomian dan perdagangan global menjadi lebih tertekan. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melaporkan bahwa volume barang dagangan yang diperdagangkan menurun sebesar 3% YoY pada kuartal pertama tahun 2020. Berdasarkan perkiraan awal, sebagian besar populasi dunia telah terkena dampak pandemi dan tindakan blokade terkait, perdagangan global pada kuartal kedua tahun 2020. Perdagangan barang dunia juga mengalami penurunan sebesar 18,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Aliran modal internasional diperkirakan akan terkena dampak penurunan volume perdagangan global (Qin et al., 2020), yang akan meningkatkan volatilitas nilai tukar secara signifikan. Lembaga keuangan mengantisipasi peningkatan risiko sebagai akibat dari ketidakseimbangan permintaan aset keuangan asing ketika aliran modal global menurun. Hal ini

menyebabkan investor menilai kembali independensi kepemilikan mata uangnya, yang pada akhirnya berdampak pada volatilitas nilai tukar (Debelle, 2020; Gabaix dan Maggiori, 2015).

Nilai tukar merupakan salah satu variabel dalam menjaga stabilitas makro ekonomi suatu negara. Nilai tukar dapat menjadi tolak ukur daya saing eksternal, memberikan gambaran posisi neraca pembayaran, serta dapat menjelaskan tingkat harga secara umum. Stabilitas nilai tukar sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Nilai tukar terbagi menjadi 2 yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal yaitu selisih antara harga mata uang suatu negara dengan negara lainnya (Mankiw, 2007). Sedangkan nilai tukar riil merupakan perbandingan harga mata uang antar 2 negara dengan menghitung variabel inflasi. Publikasi *ASEAN Statistical Yearbook 2022* memperlihatkan bahwa sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2019 nilai tukar riil negara ASEAN secara rata-rata mengalami depresiasi. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 negara di ASEAN seperti Brunei Darussalam dan Singapura tidak mengalami apresiasi maupun depresiasi nilai tukar. Selain itu, negara seperti Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam mengalami depresiasi nilai tukar 100 satuan. Akan tetapi, ada juga negara seperti Kamboja dan Philipina yang mengalami apresiasi nilai tukar 10 satuan.

Pada tahun 2020 Indonesia dan Laos yang memiliki depresiasi nilai tukar yang paling besar. Indonesia pada tahun 2019 memiliki nilai tukar terhadap dolar AS Rp.13.900, dan pada tahun 2020 menjadi Rp.14.105. Laos pada tahun 2019 memiliki nilai tukar terhadap dolar AS 8.679,4 LAK, dan pada tahun 2020 menjadi 9.381 LAK. Sedangkan Myanmar menjadi negara yang mengalami apresiasi nilai tukar paling tinggi di ASEAN, semula di tahun 2019 K1.522,6 dan pada tahun 2020 menjadi K1.377,5.

Pandemi COVID-19 secara signifikan mengubah tatanan ekonomi global, tidak terkecuali di ASEAN. Negara anggota ASEAN memiliki langkah-langkah pencegahan, termasuk *lockdown* dan pembatasan perjalanan, menghasilkan distorsi besar dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Fluktuasi nilai tukar menjadi cerminan dari tingginya ketidakpastian di pasar keuangan regional.

Dalam konteks ini, peran intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar menjadi krusial.

Penelitian volatilitas nilai tukar yang disebabkan oleh COVID-19 ini sudah dilakukan oleh (Feng et al., 2021) melakukan penelitian tentang respon volatilitas nilai tukar terhadap COVID-19 di 20 negara, mendapatkan hasil bahwa peningkatan kasus terkonfirmasi memang meningkatkan volatilitas nilai tukar secara signifikan. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah sebagai respons terhadap pandemi ini, seperti penutupan sekolah, pembatasan pergerakan internal, dan kampanye informasi publik juga menyebabkan fluktuasi nilai tukar. Selain itu, kebijakan respons ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah selama pandemi, termasuk dukungan pendapatan, langkah-langkah fiskal, dan bantuan internasional, mempunyai efek menahan volatilitas nilai tukar. Temuan pada penelitian ini memberikan informasi dan implikasi berharga bagi pembuat kebijakan dan investor keuangan di seluruh dunia.

Dunia baru saja melewati krisis pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak bersifat global dan menyeluruh. Banyak kajian mencoba untuk mengungkapkan dampak pandemi tersebut terhadap perekonomian lokal, nasional, dan global. Baru-baru ini berbagai kajian telah melaporkan dampak mewabahnya pandemi COVID-19 terhadap kondisi makroekonomi, pasar keuangan, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya, namun penelitian yang mengupas tentang dampak pandemi terhadap volatilitas nilai tukar, khususnya di suatu kawasan integrasi ekonomi tertentu masih sangat terbatas. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara COVID-19 dan volatilitas nilai tukar di ASEAN. Meskipun sebagian besar penelitian menekankan dampak COVID-19 terhadap perekonomian global dan pasar saham (Sharif 2020); Zhang 2020), tetapi perhatian utama penelitian ini dialihkan pada volatilitas nilai tukar dan berupaya memberikan analisis yang lebih lengkap mengenai hubungan antara COVID-19 dan volatilitas nilai tukar. Hal ini menjadi penting mengingat ASEAN sebagai suatu kawasan integrasi dimana negara-negara anggotanya memiliki keterkaitan aktivitas perekonomian yang cukup kuat, baik dalam bentuk perdagangan internasional, investasi luar negeri dan lainnya. Temuan ini nantinya

dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana dinamika kesehatan dapat mempengaruhi pergerakan mata uang antara negara. Selanjutnya penelitian ini juga akan membahas tentang efektivitas intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap fluktuasi nilai tukar selama periode pandemi.

Ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai tukar di kawasan ASEAN merespon dan bagaimana intervensi pemerintah dapat membentuk stabilitas nilai tukar ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih luas dengan mengangkat judul **“Pandemi COVID-19 Dan Volatilitas Nilai Tukar Di Kawasan Asean”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pandemi COVID-19 secara signifikan mengubah tatanan ekonomi global, tidak terkecuali di ASEAN. Negara anggota ASEAN langkah-langkah pencegahan, termasuk *lockdown* dan pembatasan perjalanan, menghasilkan distorsi besar dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Fluktuasi nilai tukar menjadi cerminan dari tingginya ketidakpastian di pasar keuangan regional. Dalam konteks ini, peran intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar menjadi krusial. Berdasarkan uraian di atas, di rumuskanlah masalah penelitian yakni bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap nilai tukar di kawasan ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap nilai tukar di kawasan ASEAN.